RAPID TEST ASN DAN NAKES

11 Orang Reaktif

SLEMAN (KR) - Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sleman melakukan uji rapid test terhadap petugas kesehatan yang bertugas memeriksa pengunjung Indogrosir di GOR Pangukan dan ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman. Hasilnya, dari 300 orang yang diperiksa, 11 di antaranya dinyatakan reaktif dalam rapid test di Kantor BPBD Sleman, Kamis (4/6).

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Sleman Novita Krisnaeni mengatakan, pihaknya masih menelusuri 11 orang yang dinyatakan reaktif berasal dari instansi mana. "Dari 300 orang yang reaktif ada 11. Detailnya masih belum selesai. Soalnya pelaksanaannya uji rapid test dicampur, jadi harus dipilah lagi," ujarnya kepada *KR*, Kamis (4/6).

Menurut Novita, rapid test bagi petugas kali ini dilaksanakan secara bersamaan dengan pertimbangan efektifitas petugas dan tempatnya. Bagi 11 orang yang reaktif, akan menjalani karantina mandiri di Asrama Haji Sleman. Mereka juga akan didaftarkan untuk pemeriksaan swab tenggorakan.

Meski ada petugas di GOR Pangukan yang reaktif, Dinkes memastikan tidak akan kekurangan petugas kesehatan. Terlebih dalam waktu dekat, Dinkes juga akan melaksanakan uji rapid test massal di 14 pasar yang ada di Kabupaten Sleman. "Yang dinyatakan reaktif memang belum bisa bergabung dalam pemeriksaan uji rapid test di pasar-pasar. Nanti kami akan bagi sesuai wilayah Puskesmas terdekat. Jadi tidak akan kekurangan," tandasnya. **(Aha)-f**

DINAS PARIWISATA SLEMAN LAKUKAN ANTISIPASI

Pascapandemi Covid-19, Tren 'Mass Tourism' Bergeser

SLEMAN (KR) - Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, mau tidak mau atau siap tidak siap mengharuskan adanya perubahan tatanan baru di tengah masyarakat. Salah satu yang sangat mendasar adalah perubahan tatanan nilai budaya masyarakat. Perubahan ini tentunya juga berpengaruh pada perilaku masyarakat baik dalam perilaku sosial maupun perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersiernya.

"Wisata merupakan salah satu kebutuhan masyarakat untuk menstimulasi kesehatan jiwa dan raga. Bahkan sudah ada kelompok masyarakat yang menilai wisata merupakan kebutuhan primer bagi mereka. Begitu kuat peran budaya dalam menggeser keberadaan wisata dari kebutuhan tersier menjadi kebutuhan primer. Demikian juga wisata pada era pascapandemi Covid-19, akan ada standar baru yang menjadi perilaku orang dalam berwisata," ungkap Kadinas Pariwisata Sleman Hj Sudarningsih kepada *KR* di kantornya, Kamis (4/6).

Dijelaskan, bentuk-bentuk aktivitas yang rentan dalam masa pandemi Covid-19 akan cenderung masih dihindari.

KR-Istimewa

Sudarningsih

"Dan dalam *demand* pariwisata, saya kira akan berlaku juga. Masyarakat akan masih cenderung menerapkan *social distancing* dalam perilakunya yang dalam *demand* pariwisata dapat kita artikan pasar wisata pascapandemi akan bergeser dari kecenderungan wisata massal menjadi wisata personal, *couple*, atau juga wisata keluarga dengan memperhatikan *clean, health, and safety* (CHS)," ujar Sudarningsih.

Dengan demikian, pariwisata sebagai *supplyer* agar dapat survive haruslah mengikuti perubahan selera *demand* dari market yang ada. Desa wisata yang pada waktu sebelum pandemi diuntungkan dengan pola *mass tourism* harus berinovasi untuk siap bersaing di pasar pascapandemi.

"Saya menilai pascapandemi Covid-19 ini pasarnya sangat besar, dan yang akan bergerak dimulai dari pasar lokal dan regional. Dinas Pariwisata Sleman sudah melakukan penguatan sinergitas dengan pelaku desa wisata dan pelaku pariwisata lainnya untuk berbenah dan mempersiapkan diri dalam menyambut perubahan ini. Antara lain penyiapan sarana prasarana yang sesuai protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang secara prinsip harus aman bagi wisatawan, aman bagi operator pariwisatanya, dan juga aman bagi lingkungannya.

"Penguatan PHBS pada destinasi wisata juga perlu dilakukan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan SDM pelaku wisata, serta pengemasan atraksi. Kami optimis pascapandemi Covid-19 ini pergerakan sektor pariwisata akan relatif lebih cepat dari sektor yang lain," pungkas Sudarningsih. **(Has) -f**

AKBP ANTON JABAT KAPOLRES SLEMAN

Pengamanan Pilkada-Pilkades Jadi Prioritas

KR-Wahyu Priyanti

AKBP Anton Firmanto SIK salam komando dengan AKBP Rizky Ferdiansyah SIK.

SLEMAN (KR) - Kapolres Sleman kini dinakhodai AKBP Anton Firmanto SIK setelah perwira menengah itu dilantik oleh Kapolda DIY Irjen Pol Asep Suhendar, Kamis (4/6) siang. Menjadi orang nomor satu di wilayah hukum yang rawan gangguan kamtibmas, menjadi catatan tersendiri bagi AKBP Anton dalam mengemban amanat.

"Kita segera pelajari gangguan kamtibmas apa saja yang paling menonjol, kemudian akan kami ambil langkah penanganan. Jika ada kejahatan, ya kita harus terjun langsung ke lapangan," ucap AKBP Anton usai serahterima jabatan dari AKBP Rizky Ferdiansyah SIK.

Dunia kriminalitas, bukan hal baru bagi AKBP Anton, apalagi dia pernah menjabat Kasat Reskrim di Polda Maluku Utara dan Polda Jawa Barat. Bahkan sebelum dipercaya menjabat Kapolres Sleman, AKBP Anton berdinas di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

Alumni Akpol angkatan tahun 2000 itu mengatakan, fokus tugas dalam waktu dekat adalah pengamanan pelaksanaan agenda politik, baik Pilkada dan Pilkades. "Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan Pilkades dan Pilkada, maka konsentrasi kita akan ke sana," tandas Kapolres yang hobi olahraga lari ini.

Selain Kapolres Sleman, Kapolda DIY juga melantik Kombes Pol Sudjarwoko yang sebelumnya menjabat Dirresnarkoba Polda NTB sebagai Kapolresta Yogyakarta. Selain itu melantik Dirsamapta Kombes Pol Aloysius Liliek Darmanto dan Kabidkeu Kombes Pol Marsono yang sebelumnya Kabidkeu Polda Kalteng. **(Ayu)-f**

Data Penerima Bantuan Banyak Tak Valid

SLEMAN (KR) - Bantuan Sosial Tunai (BST) maupun bantuan lain sebagai imbas dari Covid-19 menjadi persoalan sendiri di tingkat bawah. Khususnya terkait data yang kurang valid.

Hal ini dikarenakan dari Kemensos ternyata masih memakai data 2015 sebagai penerima bantuan dan langsung diturunkan ke bawah untuk dilakukan verifikasi. Hasil dari verifikasi tersebut dikembalikan lagi ke pusat dan ternyata begitu nama-nama penerimanya muncul tidak ada perubahan. Tetap masih menggunakan data dari 2015.

Imbasnya terjadi ketidakvalidan data di tingkat bawah. Mulai dari data ganda, sudah meninggal hingga satu keluarga mendapatkan undangan sebagai penerima semua. Di sisi lain, warga yang memang seharusnya berhak mendapatkan bantuan justru terlewatkan.

"Kenapa data bisa tumpang tindih? Karena dari 2015 sampai sekarang itu otomatis sudah terjadi perubahan data. Ada yang sudah meninggal, pindah, yang sebelumnya tidak mampu sekarang mampu atau yang 2015 mampu sekarang tidak mampu. Apalagi di tempat kami, perekonomian itu sangat fluktuatif. Sekarang tidak mampu, ada kemungkinan pekan depan sudah jadi konglomerat," ujar Kasi Pelayanan Desa Condongcatur Kecamatan Depok Al Thauvik Sofisalam ketika memaparkan kondisi bantuan kepada Komisi A DPRD DIY di Kantor Kecamatan Depok, Kamis (4/6).

Tidak validnya data penerima bantuan Covid-19 ini juga diakui oleh Camat Depok Abu Bakar. Meskipun sudah diverifikasi tetap saja belum bersih. Beruntung, warga yang merasa mampu tapi mendapatkan undangan memilih untuk tidak mengambilnya dan melaporkan ke pihak desa.

Permasalahan ini akan dibawa Komisi A DPRD DIY dalam rapat kerja dengan mengundang instansi terkait. "Apakah semuanya sudah disalurkan kepada penerima? Jika belum, ada berapa yang menerima. Kenapa sampai tidak menerima?" ungkap Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto. **(Awh/Bro)-f**

Pemkab Terima APD dari IKA UNY

KR-Istimewa

Penyerahan secara simbolis bantuan dari IKA UNY

SLEMAN (KR) - Pemkab Sleman kembali menerima bantuan Alat Pelindung Diri (APD) untuk penanganan Covid-19 dari Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta (IKA UNY) di Pendapa Parasamya Pemda Sleman, Kamis (4/6). Bantuan diserahkan oleh Ketua DPP IKA UNY Prof Suyanto dan diterima langsung oleh Bupati Sri Purnomo. Hadir pula Kepala Dinas Kesehatan Sleman dr Joko Hastaryo dan Dewan Pengawas IK Alumni UNY Prof dr Sumaryanto.

Prof Suyanto mengatakan, bantuan tersebut merupakan upaya IKA UNY untuk membantu dalam menanggulangi penyebaran Covid-19. Adapun bantuan yang diserahkan berupa hazmat 125 buah, face shield 125 buah dan masker 250 buah. "Kami berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi Pemkab Sleman," ungkapnya. **(Has)-f**

PKB Klaim Dapatkan Tiket Pilkada

SLEMAN (KR) - DPC PKB Sleman mengklaim telah mendapatkan tiket untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sekarang ini PKB Sleman telah ada kesepahaman dengan beberapa partai. Namun untuk pasangan calon masih dilakukan pembicaraan dengan partai lain.

Sekretaris DPC PKB Sleman Tri Nugroho SE mengatakan, PKB telah melakukan komunikasi secara intens dengan beberapa partai politik. Bahkan telah menjalin kesepakatan untuk maju dalam Pilkada 2020 mendatang.

"Kami sudah ada kesepakatan bersama dengan partai lain, tapi untuk namanya belum bisa kami sampaikan. Bahkan sudah memiliki lebih dari 10 kursi sehingga kami bisa maju dalam Pilkada nanti," kata Tri Nugroho di Sleman, Kamis (4/6).

Menurutnya, sekarang ini sudah saatnya PKB memiliki wakil yang duduk di eksekutif. Bahkan Tim 9 telah menunjuk Agus Kholiq sebagai calon kepala daerah dari PKB. "Target kami memiliki kader yang duduk di eksekutif, baik itu sebagai bupati maupun wakil bupati. Kami akan *all out* untuk memenangkan Pilkada nanti," ujarnya.

Disinggung pasangan calon, pria yang kerap dipanggil Hohok ini mengaku, untuk pasangan yang mendampingi Agus Kholiq masih dilakukan pembicaraan dengan partai lainnya. Termasuk siapa yang menjadi calon bupati maupun wakil bupati. Ditargetkan bulan ini, pasangan calon sudah mengerucut. "Beberapa kandidat memang sudah ada dan sedang digodok bersama partai lain. Mudah-mudahan bulan ini, sudah ada pasangan yang disepakati untuk maju dalam Pilkada," tuturnya. **(Sni)-f**

DPRD KABUPATEN SLEMAN
SUARA WAKIL RAKYAT
Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp (0274)868413, Fax (0274) 868413

Menyiasati Kebudayaan Menuju Normal Baru

Susilo Nugroho SIP Anggota DPRD Sleman dari PDI Perjuangan

KR-Saifullah Nur Ichwan

Susilo Nugroho SIP

SLEMAN (KR) - Kegiatan kesenian dan kebudayaan selama pandemi Covid-19 banyak yang mati atau tak beraktivitas. Tentunya ini berdampak pada penghasilan para seniman. Untuk itu para seniman dan pemerintah daerah perlu menyiasati kebudayaan menuju new normal agar kesenian serta kebudayaan dapat aktif kembali.

Anggota DPRD Kabupaten Sleman dari Fraksi PDI Perjuangan Susilo Nugroho SIP mengatakan, kegiatan kesenian dan kebudayaan ini tidak hanya menguntungkan para seniman. Namun juga menggerakkan ekonomi masyarakat saat pertunjukan seperti pedagang makanan, mainan, juru parkir dan lainnya.

"Namun selama pandemi, semua kegiatan kesenian dan kebudayaan yang melibatkan orang banyak ditiadakan. Otomatis pendapatan para seniman dan masyarakat menjadi berkurang. Atau bahkan tidak ada penghasilan sama sekali," kata Susilo kepada *KR*, Kamis (4/6).

Memang selama pandemi, ada seniman yang tetap berkarya atau melakukan pertunjukan. Namun pelaksanaannya dilakukan secara virtual seperti pertunjukan wayang kulit. "Itu hanya sebagian saja yang bisa melaksanakan kegiatan kesenian dan kebudayaan secara virtual. Sementara mayoritas seniman lainnya tidak bisa beraktivitas," ujarnya.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sleman ini mendorong pemerintah daerah dan seniman untuk menyiasati agar kesenian serta kebudayaan kembali menggeliat saat tatanan baru diberlakukan di DIY. Namun pelaksanaan kesenian dan kebudayaan harus memperhatikan protokol kesehatan, seperti jaga jarak, pengecekan suhu tubuh dan disediakan cuci tangan.

"Misalnya mengadakan pertunjukan di dalam gedung. Tapi hanya dihadiri undangan dengan jumlah terbatas dan tetap menerapkan *physical distancing*. Kemudian pertunjukan itu perlu disiarkan secara live, baik melalui televisi maupun media sosial supaya bisa ditonton masyarakat luas," kata politisi dari Dapil 4 Sleman ini.

Para seniman yang akan melakukan pertunjukan, sebaiknya dilakukan tes bebas dari Covid-19. Hal itu untuk memberikan kenyamanan bagi seniman maupun penonton yang menyaksikan pertunjukan. "Jadi yang terlibat dalam kegiatan kesenian harus ada surat kesehatan bebas dari Covid-19. Tujuannya untuk mencegah penyebaran virus," katanya.

Menurut Susilo, perlu digeliatkan kembali aktivitas ini karena kesenian dan kebudayaan merupakan sektor pendukung dari pariwisata di DIY. Apalagi pemerintah sudah mencanangkan, dalam waktu dekat sektor pariwisata akan dibuka kembali.

"Artinya kesenian dan kebudayaan perlu dipersiapkan sejak sekarang untuk menghadapi tatanan kenormalan baru. Makanya perlu strategi untuk menghadapi itu," pintanya. **(Sni)-f**